

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Semarang pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan signifikan jika dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, yaitu sebesar 7.475,6 ha dan 341.767 ha, sehingga menekankan pentingnya pendekatan yang berbeda dalam perencanaan RTH. Selain itu, Kecamatan Tembalang, Pedurungan, dan Semarang Barat menjadi wilayah dengan kebutuhan RTH publik terbesar, yang menunjukkan prioritas perhatian dalam pengembangan ruang terbuka hijau di kota ini.

Oleh karena itu, strategi pengembangan RTH publik yang paling sesuai adalah strategi S-O (*Strength-Opportunity*), yakni memaksimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ini mencakup dukungan pemerintah dalam penyediaan RTH publik minimal 20% mengingat saat ini RTH publik baru mencapai 7,03% di Kota Semarang, alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan, implementasi program kota hijau dalam RPJMD, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta pemberian insentif bagi pihak yang mendukung penyediaan RTH, sehingga semua peluang dapat dioptimalkan secara sistematis.

Selain itu, prosedur pemenuhan RTH publik dimulai dari identifikasi dan perencanaan awal, pemetaan lahan prioritas, analisis SWOT, serta sinkronisasi kebijakan dengan regulasi tata ruang. Selanjutnya, dilaksanakan pemulihan operasional P2KH, peningkatan kinerja administrasi dan teknis, pengembangan RTH publik bertahap, serta penegakan regulasi termasuk pengawasan alih fungsi lahan. Tahap evaluasi dan *monitoring* dilakukan untuk memastikan kesesuaian pembangunan RTHP dengan standar dan rencana tata ruang, kemudian diikuti dengan tindakan lanjutan melalui pada integrasi konsep kota hijau dan kota berkelanjutan ke dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan.

5.2 Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus tidak hanya pada kuantitas Ruang Terbuka Hijau publik, tetapi juga pada kualitasnya, yang mencakup kenyamanan termal, aksesibilitas bagi masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Pendekatan multidimensional ini penting agar RTH dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang publik yang mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan penelitian, disarankan agar peneliti bekerja sama langsung dengan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distarum), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Kerja sama ini dapat meliputi pengumpulan data, pemantauan kondisi vegetasi dan RTH, serta evaluasi efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau. Keterlibatan pihak-pihak tersebut akan memperkuat validitas data dan relevansi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, sekaligus mendukung implementasi pengembangan RTH publik yang berkelanjutan di Kota Semarang.

Dari segi metode, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan *Soft System Methodology* (SSM) dengan alat analisis berbasis multikriteria yang dengan pendekatan pembobotan kriteria, penilaian berbasis skor, dan pemberian *ranking* alternatif. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan prioritas tindakan secara lebih objektif dan transparan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam pemenuhan ruang terbuka hijau publik.